



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	38 (tiga puluh delapan)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ir. Ardiansyah Parman
Hari, Tanggal	:	Senin, 3 Oktober 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Mendapatkan masukan terkait Indonesia belum memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan.
Hadir	:	1. 20 Orang dari 32 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ir. Ardiansyah Parman

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ir. Ardiansyah Parman pada pukul 10.16 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 3 Oktober 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima

## II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan masukan terkait Indonesia belum memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan dari Ir. Ardiansyah Parman, pakar yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini.

Dalam membangun bursa berjangka komoditas yang kredibel tentu harus membangun suatu ekosistem perdagangan yang efisien, andal dan transparan. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam membangun ekosistem tersebut adalah:

1. Memiliki data yang valid, transparan sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat.
2. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah konsisten, tidak berubah-ubah.
3. Produksi dari barang dan jasa terukur dengan jelas.
4. Lalu lintas barang dan jasa harus diatur, dengan adanya jaminan UU logistik nasional.
5. Kesamaan visi Regulasi, pemerintah, pelaku usaha.
6. Peran masyarakat.
7. Adanya kepastian hukum apabila terjadi sengketa.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**Ttd.**

**ARIA BIMA  
A-189**